

Kebijakan Pemerintah Inggris Di Era David Cameron Terhadap Pertumbuhan Populasi Muslim Di Inggris Ditengah Fenomena Islamophobia

Riko Nazar Rahman

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Email: nazarrahman8@gmail.com

Pembimbing: Ali Muhammad, M.A., Ph.D.

ABSTRACT

This journal will explain about the United Kingdom government's policies toward Muslims society that have growth double term 2001 and 2011. David Easton says that a policy taken by government with consider some variables such as system, environment, response, and feedback. The growth of Muslims population in United Kingdom has a big relations with number of immigrants who entering United Kingdom increase significantly. While the growth of Muslims population in United Kingdom still going, at the same time, Muslims all around the world, including in the United Kingdom facing the phenomenon of islamophobia which forced Muslims back down. Discriminative attitude of British society make Muslims there live with no safety guarantee, and they feel like being exiled by people majotiry. The policies of United Kingdom government's take also look like they aggred with what British society do to Muslims there. David Cameron administrative choose to takle and decrease the number of migrant who entering their country, including Muslim migrants, and David Cameron also fight against extremism to avoid it affecting Muslims in United Kingdom to do same with what happen in Middle East.

Keywords: *Muslims Population, Islamophobia, David Cameron*

Pendahuluan

Islam menjadi agama dengan pertumbuhan pengikut paling cepat di Inggris. Hasil sensus pada tahun 2011 yang lalu didapatkan data bahwa populasi Muslim di Inggris mengalami peningkatan, jumlah Muslim di Inggris mencapai 2.786.866 jiwa (The Muslim Council of Britain, 2015). Angka tersebut merupakan hasil sensus yang dilakukan pada tahun 2011 tersebut telah menunjukkan grafik peningkatan Muslim di Inggris hampir mencapai dua kali lipat apabila dibandingkan dengan sensus yang dilakukan pada tahun 2001 yang berjumlah sekitar 1,55 juta jiwa.

Pertumbuhan populasi Muslim yang ada di Inggris juga merupakan bagian dari pertumbuhan jumlah Muslim yang ada di dunia pada saat ini jumlahnya mencapai 23 persen dari total populasi manusia di dunia yang mencapai 7 milyar jiwa menurut data dari PBB.

Populasi Muslim di Inggris sebagian besar merupakan imigran yang berasal dari berbagai belahan dunia, terutama dari wilayah Asia dan Afrika. Negara-negara Asia Selatan seperti Pakistan dan Bangladesh merupakan dua dari beberapa negara yang banyak memberikan kontribusi di dalam pertumbuhan jumlah populasi Muslim di Inggris saat ini.

Hasil sensus tahun 2011 menunjukkan bahwa ada 599.427 imigran Muslim yang masuk ke Inggris (The Muslim Council of Britain, 2015), Muslim pendatang yang masuk di Inggris mayoritas berasal dari negara-negara di Asia Selatan, Timur Tengah,

Afrika Utara, Eropa, dan lain-lain. Dan, menurut data yang ada, Pakistan merupakan negara dengan jumlah imigran Muslim terbanyak yang ada di Inggris.

Pada pertengahan tahun 2008, *Office for National Statistic* memperkirakan ada sekitar 899.000 orang Pakistan di Inggris, dan dari jumlah tersebut sekitar 827.080 jiwa merupakan Muslim. Selain dari Asia, Eropa, dan Afrika, para imigran Muslim yang datang ke Inggris ada juga yang berasal dari wilayah Amerika dan Oseania, meskipun jumlahnya tidak banyak. Para imigran yang datang ke Inggris mayoritas mereka bertujuan untuk mencari kondisi ekonomi yang lebih baik lagi, namun, ada juga yang datang karena faktor keamanan.

Selain dipengaruhi dengan banyaknya imigran Muslim yang masuk ke Inggris, pertumbuhan populasi Muslim disana juga dipengaruhi dengan banyaknya mualaf atau orang yang tadinya bukan Muslim kemudian menjadi seorang Muslim. Pada sensus tahun 2001, ada puluhan ribu orang di Inggris yang berpindah agama menjadi seorang orang Muslim atau mualaf, dan jumlahnya naik menjadi sekitar 100 ribu pada tahun 2010 (Brice, 2010).

Ketika populasi Muslim di Inggris terus bertambah dengan cepat, akan tetapi pada waktu yang bersamaan, negara-negara Barat, termasuk Inggris dilanda fenomena islamophobia. Peristiwa pengeboman gedung *World Trade Center* (WTC) di New York, Amerika Serikat pada tanggal 11 September 2001 yang dituduh dilakukan oleh orang-orang Islam dengan ideologi yang radikal, Al-Qaeda. Orang-orang non-Muslim kemudian merasa ketakutan dan menganggap bahwa Islam adalah agama yang identik

dengan terorisme. Apalagi di Inggris ditambah lagi dengan peristiwa pengeboman di stasiun kereta api bawah tanah (*Underground*) dan beberapa bus di London pada 7 Juli 2005.

Survei yang dilakukan oleh *YouGov* menunjukkan bahwa rakyat Inggris menolak Islam berkembang di negara mereka, dan menolak orang Muslim menjadi tetangga mereka (Allen, 2010).

Pemerintah Inggris beserta parlemen Inggris berhasil untuk membuat undang-undang *Immigration Act 2014* yang di dalamnya banyak mengatur masalah pemulangan imigran ke negara asal mereka atau deportasi. Pemerintah Inggris juga sudah aktif di dalam upaya mereka membatasi masuknya imigran ke Inggris dan memulangkan imigran yang bermasalah ke negara asal mereka.

David Cameron di dalam masalah menangani kelompok Islam radikal, dia masih hampir sama dengan pemerintahan sebelumnya mereka sama-sama menggunakan kekuatan militer untuk melawan kelompok Islam radikal.

Pemerintah Inggris bekerjasama dengan banyak pihak untuk mencegah menyebarnya pemikiran yang radikal di dalam masyarakat Muslim Inggris, pemerintah Inggris terus berupaya mendorong supaya masyarakat Muslim Inggris mempunyai pemikiran yang lebih moderat.

Model Pengambilan Kebijakan David Easton

David Easton mencoba untuk menjelaskan interaksi antara anggota yang terlibat di dalam suatu sistem politik yang memiliki kebiasaannya masing-masing di dalam peran mereka. Easton memberikan kita 4 premis utama di dalam arus model yang dia buat yaitu sistem, lingkungan, respon, dan kemudian yang terakhir adalah umpan balik (Pooja Articles, 2013).

Sistem menurut Easton di sini adalah sistem politik yang mana di dalamnya banyak sekali aktor yang terlibat seperti partai politik dan organisasi-organisasi yang memiliki kepentingan. Sistem politik adalah keseluruhan dari interaksi-interaksi yang mengatur pembagian nilai-nilai secara autoritatif (berdasarkan wewenang) untuk dan atas nama masyarakat (Budiardjo, 2008).

Sistem menurut Easton harus mengandung nilai, budaya, otoritas, pemerintahan, pelaksanaan kebijakan, partisipasi, proses, dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah lingkungan, lingkungan menurut Easton ada dua yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Lingkungan internal kondisi dalam negeri sebuah negara itu sendiri mulai dari sosial hingga alam, sedangkan lingkungan eksternal adalah sistem politik internasional, aliansi, dan lain-lain.

Sebuah sistem politik dikendalikan oleh *input* dan *output*, yang dimana *input* terdiri atas *demands* dan *supports*, sedangkan *output* terdiri atas keputusan dan kebijakan dari sebuah pemerintahan.

Input terdiri atas dua macam yaitu tuntutan serta dukungan. Keberadaan *Input* adalah untuk memberikan informasi serta fakta-fakta yang kemudian harus diolah oleh sistem itu sendiri, dan juga merupakan sumber kehidupan yang dibutuhkan demi

keberlangsungan sistem itu sendiri (Mohtar & Mac, 2008). Sebuah sistem politik ada dikarenakan masyarakat melibatkan diri mereka dengan cara memberikan tuntutan-tuntutan yang harus dipenuhi, namun, terkadang tuntutan mereka tidak dapat dipenuhi secara maksimal oleh pemerintah. Tuntutan bisa menjadi sebuah input didalam sebuah sistem politik apabila tuntutan mereka disampaikan secara terorganisir dengan baik.

Supaya sebuah sistem tetap bisa menjalankan fungsinya dengan baik, sistem itu membutuhkan energi dalam bentuk tindakan-tindakan yang memajukan dan merintangangi suatu sistem politik, tuntutan-tuntutan yang timbul didalamnya, dan keputusan-keputusan yang dihasilkannya, hal ini yang disebut dengan dukungan.

Dukungan yang dimasukan kedalam sistem politik dan mengarah pada tiga sasaran; komunitas, rejim, serta pemerintah.

Easton menekankan pentingnya jumlah anggota yang mendukung sistem yang ada, terkadang hanya sebagian kecil saja dari anggota sistem yang mendukung sehingga tetap bisa memberikan dorongan untuk keberlangsungan dari sistem tersebut, namun akan lebih baik lagi apabila mayoritas dari anggota sistem. Ruang lingkup dari dukungan yang semakin luas juga akan semakin baik.

Umpan balik adalah tanggapan terhadap keputusan atau kebijakan yang sudah dikeluarkan pemerintah.

Apabila dikaitkan tentang sebab kebijakan yang diambil oleh pemerintah Inggris terhadap fenomena pertumbuhan populasi Muslim di sana, maka kita bisa menelaah mulai dari lingkungan. Pertama dari lingkungan internal di mana masyarakat Inggris menolak keberadaan orang-orang Muslim yang ada di Inggris. Masuk ke lingkungan eksternal, bahwa kebijakan pemerintah Inggris juga mendapatkan pengaruh dari dunia internasional di mana mereka mereka perlu untuk mengevaluasi tentang masalah imigran Muslim.

Inggris juga harus mempertimbangkan karena Inggris merupakan salah satu negara yang menandatangani Konvensi PBB untuk masalah Pengungsi tahun 1951, dan juga menandatangani Konvensi Eropa untuk Hak Asasi Manusia, yang di mana kedua konvensi tersebut menuntut negara yang menandatangani mempunyai kewajiban untuk melindungi para pengungsi yang masuk ke negara mereka, dan tidak mengirim pulang ke negara asal apabila keamanan tidak terjamin.

Konteks tersebut kemudian dijadikan bahan masukan atau *input* untuk membuat kebijakan. Yang pertama adalah tuntutan yang berasal dari luar, di mana masyarakat Inggris itu menuntut supaya pemerintah Inggris melindungi mereka dari ancaman kaum imigran, terlebih lagi dari masuknya imigran Muslim yang dianggap sebagai ancaman bagi keamanan mereka.

Kemudian tuntutan juga datang dari dalam sistem itu sendiri di mana David Cameron yang berasal dari partai Konservatif yang memiliki ideologi yang bersifat lebih anti imigran, memberikan tekanan kepada pemerintahan David Cameron supaya membuat kebijakan yang bisa melindungi masyarakat Inggris dari ancaman para imigran.

Dukungan sebagai salah satu *input* berasal dari masyarakat Inggris yang memenangkan partai Konservatif pada pemilu tahun 2010 dan 2015 dengan memberikan suaranya dan kembali memilih partai Konservatif untuk memimpin Inggris. Dukungan politik juga datang dari partai Liberal Demokrat dan United

Kingdom Independence Party (UKIP) yang merupakan mitra koalisi partai Konservatif pada pemilu tahun 2010.

Dukungan tersebut membuat proses dari sebuah system di parlemen Inggris menjadi lebih mudah untuk David Cameron mengambil sebuah kebijakan karena mendapatkan dukungan yang besar dari anggota sistem.

Pemerintah Inggris berusaha membuat Muslim yang berada di Inggris menjadi Muslim yang berpaham moderat, di mana mereka harus mau untuk menjalankan nilai-nilai sekuler liberal sehingga Muslim Inggris akan terbebas dari paham radikal yang banyak dipakai oleh kelompok Islam radikal yang dianggap menjadi penyebab dari aksi terorisme di dunia.

Pembahasan

Ketika Inggris mendirikan perusahaan *East India Company*, mereka banyak mempekerjakan Muslim India, termasuk juga bekerja di kapal perusahaan (BBC History, 2009), dan mereka sering untuk berpergian antara India dan Inggris. Muslim di Inggris banyak berkembang di kota-kota pelabuhan yang ada di Inggris, terlebih lagi, banyak imigran yang memutuskan untuk menetap Inggris.

Setelah Terusan Suez dibuka pada tahun 1869, jumlah imigran Muslim yang masuk ke Inggris jumlahnya terus meningkat. Kebanyakan, imigran-imigran tersebut berasal dari Yaman, hal ini tidak terlepas dari Yaman yang menjadi tempat persinggahan kapal-kapal dagang yang telah maupun akan melewati Terusan Suez.

Pada awal abad ke 20, jumlah Muslim yang ada di Inggris sudah mencapai 10.000 orang, para imigran tersebut kebanyakan berasal dari wilayah Asia Selatan, dan negara-negara *commonwealth* lainnya. Sebelum 1962, imigran negara yang tergabung di dalam *commonwealth* bisa dengan mudah masuk ke Inggris karena dianggap sebagai bagian dari Kerajaan Inggris. Namun tidak bisa lagi dirasakan setelah Parlemen Inggris mengeluarkan *Commonwealth Immigrants Act 1962*, para imigran harus mengikuti prosedur yang berlaku untuk bisa mendapatkan visa apabila mereka ingin masuk ke Inggris.

Kemudian, pada tahun 2011, pemerintah Inggris kembali melakukan sensus yang memberikan data bahwa jumlah Muslim di Inggris sudah meningkat menjadi 2.786.866 Muslim di seluruh negara, dengan mayoritas berada di wilayah Inggris dan Wales, sedangkan di wilayah Skotlandia sekitar 77.000 Muslim dan di Irlandia Utara berjumlah sekitar 3.800 Muslim.

Dari jumlah tersebut, jumlah imigran Muslim yang masuk ke wilayah Inggris mencapai 600.000 Muslim sejak tahun 2001 hingga tahun 2011.

Bermigrasi dalam Islam artinya ada berhijrah atau berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya, hijrah ini sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad saw. yang pada saat itu beliau dan umat Muslim di Mekah berhijrah dari Mekah ke Madinah karena mereka tidak mendapatkan keamanan dari penguasa Mekah saat itu (Khosrokhavar, 2009).

Namun, dari jumlah Muslim Inggris yang sudah lebih dari 2,8 juta pada saat sekarang ini, tidak menutup kemungkinan bagi mereka untuk bisa terbawa ataupun terpengaruh dari paham-paham radikal yang disebarkan oleh kelompok jihadis.

Selain itu, mereka juga mendapatkan diskriminasi di dalam pekerjaan mereka, dan umat Muslim menjadi lebih sulit mendapatkan pekerjaan setelah kejadian 9/11 dikarenakan trauma dari para penduduk kulit putih Inggris. Kehidupan umat Muslim di Inggris juga dalam kondisi ekonomi yang kurang baik.

Diskriminasi yang didapatkan oleh Muslim Inggris juga berasal dari media-media yang ada di negara tersebut. Beberapa contoh media besar di Inggris seperti *The Guardian*, *The Independent*, *Daily Mail*, dan *The Sun* dijadikan sebagai contoh untuk penelitian pemberitaan tentang Islam (Oktober hingga Desember 2011) (Sian, Law, & Sayyid, 2012).

Bagi Inggris, perang melawan teroris menjadi semakin penting setelah negara mereka menjadi salah satu sasaran oleh kelompok Islam radikal yang melakukan pengeboman sarana transportasi di kota London pada tanggal 7 Juli 2005 (European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia, 2005). Dan pengeboman di Bandara di Glasgow, Skotlandia, di mana kejadian tersebut juga dilakukan oleh kelompok Islam yang berpaham radikal.

Ketika Blair menjabat pertama kalinya pada 1997, isu tentang imigran menjadi salah satu fokus utama dari pemerintahan partai Buruh yang berusaha menyelesaikan

masalah keimigrasian yang sebelumnya menjadi masalah ketika berakhirnya pemerintahan partai Konservatif di Inggris pada tahun 1997 (Wagner, 2012).

Inggris yang merupakan sekutu terdekat dari Amerika Serikat, di bawah Tony Blair langsung mendukung kebijakan “*war on terrorism*” yang dikeluarkan oleh Amerika Serikat, dibuktikan dengan melalui turut sertanya Inggris di dalam penyerangan ke Afghanistan pada bulan Oktober tahun 2001.

Pada periode kedua pemerintahannya, Tony Blair dihadapkan dengan peristiwa pengeboman stasiun kereta api bawah tanah dan 4 bus di kota London pada tanggal 7 Juli 2005. Peristiwa tersebut menewaskan sekitar 50 orang dan melukai 700 orang lainnya. Setelah kejadian tersebut, pemerintah Inggris menegaskan bahwa mereka tetap mengakui dan mendukung aspirasi dari komunitas-komunitas Muslim dan pihak keamanan juga sudah membuat aturan bahwa setiap tindakan balas dendam terhadap komunitas Muslim yang ada di Inggris akan ditindak secara tegas (European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia, 2005).

Pada tahun 2006 juga, *Immigration, Asylum and Nationality Act 2006*. Salah satu poin yang diubah adalah bahwa para imigran tetap akan mendapatkan hak-hak mereka ketika berada di Inggris selama mereka tidak memiliki hubungan ataupun berafiliasi dengan organisasi teroris dan atau mendukungnya. Kebijakan ini tentu saja tidak terlepas dari kejadian bom London di mana pada kejadian tersebut dilakukan oleh keturunan imigran Muslim yang mempunyai hubungan dengan organisasi Islam radikal.

Setelah tidak lagi menjabat sebagai Perdana Menteri, Tony Blair mengakui bahwa keputusannya untuk melakukan invasi militer ke negara Irak merupakan sebuah kesalahan yang besar (Watt, 2015). Ia juga mengakui bahwa kemunculan kelompok ISIS merupakan dampak dari invasi yang Inggris dan sekutunya lakukan pada tahun 2003 yang lalu.

Kebijakan-kebijakan Gordon Brown terhadap Muslim bisa dikatakan tidak konsisten, dia menegaskan bahwa “*war on terrorism*” harus segera dihentikan. Dia juga mengatakan bahwa Inggris harus memperkuat hubungan antar kelompok masyarakat, dan juga menghindari menyalahkan umat Muslim atas peristiwa terorisme yang terjadi (Hall, 2007).

Akan tetapi, pada kenyataannya justru bertolak belakang dengan apa yang ia katakan. Pada bulan Juni 2008, Inggris di bawah pemerintahan Gordon Brown mengeluarkan kebijakan untuk menambah pasukan mereka yang bertempur di Afghanistan, totalnya 9.500 pasukan pada tahun 2009.

Brown juga masih melanjutkan kebijakan “*Inclusive Britishness*” peninggalan dari pemerintahan Tony Blair. Kebijakan ini pada intinya menciptakan *image* bahwa orang tersebut merupakan orang Inggris, dan mereka harus merasa Inggris di dalam diri mereka (Uberoi & Modood, 2012). Dari kebijakan tersebut pula yang kemudian memunculkan klaim bahwa Muslim di Inggris harus memilih diantara dua pilihan yaitu “*British way*” atau “*Muslim way*”.

Belajar dari kejadian tahun 2005, dimana pengeboman di sarana transportasi di kota London pada waktu itu dilakukan oleh Muslim Inggris yang mempunyai keterkaitan dengan kelompok radikal di Timur Tengah. Pemerintah Inggris meyakini bahwa kemungkinan banyak warga Muslim Inggris yang memiliki keterkaitan dengan kelompok-kelompok radikal Islam yang sudah menyebar di negara-negara Barat.

Kita bisa melihat contohnya ketika banyak remaja Muslim Inggris yang ikut bergabung dengan kelompok ISIS di Irak dan Suriah (BBC Indonesia, 2015).

Guna mengantisipasi membludaknya imigran yang masuk ke Inggris di tahun-tahun yang akan datang. Maka dari itu, sebuah langkah yang cukup berani dilakukan oleh pemerintah Inggris untuk melakukan pembatasan jumlah yang masuk ke Inggris, dan juga memulangkan imigran yang bermasalah ke negara asalnya.

Menurut data dari pemerintah Inggris (National Statistics, 2013), pada tahun bulan Oktober-Desember 2012 sudah mendeportasi 14.435 imigran. Pada bulan Oktober-Desember tahun 2013, jumlah imigran yang di deportasi pada tahun 2013 ada 13.051 jiwa. Pada bulan Januari hingga Maret 2015, mengirim pulang para imigran yang berjumlah 626 ke 6 negara asal mereka. Sebelumnya, antara 2012 dan 2013, pemerintah Inggris sudah memulangkan lebih dari 2000 orang ke negara asal mereka.

Yang terbaru adalah rencana pemerintah Inggris yang akan mendeportasi 29.000 imigran asal Nigeria, seperti yang dikutip dari berita online *Premium Times*. Kita tahu bahwa mayoritas imigran asal Nigeria merupakan orang Muslim.

Untuk mencegah bertambahnya jumlah imigran yang terus masuk ke Inggris, menjalankan undang-undang tentang masalah imigran yaitu *Immigration Act 2014*, yang di dalamnya juga mengatur masalah pemulangan ke negara asal bagi para imigran.

Pada pemilu tahun 2010, berjanji untuk menurunkan angka tersebut menjadi di bawah 100.000 imigran. Namun, pada tahun 2014, justru jumlah imigran yang masuk ke Inggris mencapai rekor tertinggi dalam kurun waktu 10 tahun terakhir yaitu 330.000 imigran (Murray, 2015).

Setelah mengalami kegagalan di dalam membendung jumlah imigran yang masuk ke Inggris pada tahun-tahun sebelumnya. Ketika David Cameron terpilih kembali pada pemilu bulan Mei tahun 2015 yang lalu memberikan pidato politiknya, yang intinya, di dalam masalah imigran mereka akan melakukan 3 hal besar (GOV.UK, 2015):

- a) Bersikap tegas terhadap orang-orang yang seharusnya tidak berada di Inggris, dengan cara memutus jalur imigran ilegal dan melakukan deportasi terhadap para imigran ilegal yang sudah berada di Inggris.
- b) Mereformasi aturan-aturan mengenai imigrasi dan masalah buruh, sehingga bisa mengurangi permintaan jumlah imigran terampil, dan menekan angka ledakan buruh dengan keterampilan rendah.

- c) Berusaha membicarakan masalah imigran pada tingkat Uni Eropa dengan cara menegosiasi ulang pada tingkat Eropa.

Kebijakan ini tentu saja beralasan, karena ketika Inggris beradiah dibawah kepemimpinan dari partai Buruh, hampir 90 persen pekerjaan baru berhasil diambil oleh para imigran, dan di bawah partai Konservatif, mereka berjanji untuk setiap hari menciptakan seribu pekerjaan baru untuk warga asli Inggris.

Kebijakan yang dilakukan ini bertujuan untuk melindungi tenaga kerja dalam negeri dari serbuan tenaga kerja imigran dan juga usaha pemerintah Inggris untuk terus mendorong jumlah pemegang (Dathan, 2015), karena selama ini Inggris lebih banyak didominasi oleh pekerja asing sehingga warga asli Inggris tersingkirkan.

Muslim Inggris, orang asal Pakistan dan Banglades juga banyak yang menganggur dan jumlahnya lebih dari 20 persen (Cesari, 2009). Hasil sensus tahun 2011 juga menunjukkan bahwa 1 dari 5 (19,8%) warga Muslim di Inggris sudah bekerja penuh waktu (usia antara 16 hingga 74 tahun) (The Muslim Council of Britain, 2015).

Selain itu, Muslim di Inggris sebagian besarnya merupakan orang-orang yang memiliki kualifikasi di dalam masalah pekerjaan yang masih tergolong rendah. Bahkan, dari laporan *The Muslim Council of Britain* menyebutkan bahwa dari sensus tahun 2011 menunjukkan ada 464.434 Muslim yang tidak memiliki kualifikasi di dalam pekerjaan.

David Cameron juga menilai banyaknya imigran Muslim yang datang dari wilayah Timur Tengah, Asia Selatan, Afrika Utara itu dipengaruhi oleh kondisi dalam negeri mereka yang banyak terjadi konflik sehingga negara mereka menjadi tidak stabil dan keamanan menjadi terganggu. Di dalam pidatonya, dia juga mengatakan bahwa “*I don't think there is an answer that can be achieved simply by taking more and more refugees*” (Wintour, 2015), yang mengisyaratkan bahwa pemerintah Inggris menolak untuk menerima imigran, termasuk imigran Muslim yang berasal dari wilayah-wilayah konflik seperti Timur Tengah.

Faktor keamanan juga menjadi sangat penting mengingat mayoritas imigran Muslim yang datang ke Inggris berasal dari wilayah negara-negara Islam, dan selama ini dikenal sebagai tempatnya pemikiran paham Islam radikal berkembang.

Tony Blair juga mengakui bahwa kemunculan kelompok Islam radikal ISIS di Irak dan Suriah juga merupakan dampak dari invasi yang Inggris dan Amerika Serikat lakukan pada tahun 2003 yang lalu. Imigran Muslim yang datang ke Inggris dianggap sebagai salah satu ancaman bagi Inggris, seperti yang dikatakan oleh orang kepercayaan Inggris yang mengatakan di dalam pidatonya bahwa imigran Muslim ini hanya akan membahayakan keamanan dalam negeri Inggris.

Selain melakukan pengetatan di dalam masalah penerimaan imigran yang masuk ke Inggris, pemerintah Inggris juga berusaha untuk melakukan aksi militer terhadap kelompok-kelompok radikal supaya keberadaan mereka tidak terus berkembang. Keberadaan kelompok-kelompok Islam radikal seperti ISIS, Taliban, Al-Qaeda, dan

lain-lain dikhawatirkan akan mempengaruhi pemikiran Muslim yang berada di Inggris untuk melakukan tindakan yang sama dan juga memiliki pemikiran yang sama terhadap mereka yang beragama lain sebagai musuh.

Pada bulan Oktober 2015, pemerintah Inggris menawarkan uang bantuan sebesar 6,8 juta Euro (Breitbart London, 2015) kepada imam-imam yang ada di Inggris, dan pemerintah Inggris juga berjanji untuk mendirikan sebuah surat kabar khusus bagi masyarakat Muslim Inggris dengan tujuan untuk melawan paham radikal dengan menerbitkan berita-berita yang sesuai dengan nilai-nilai Barat. Kebijakan ini disebut dengan “koalisi nasional” melawan radikalisme.

Di dalam pidatonya, David Cameron mengatakan, *“We need to systematically confront and challenge extremism and the ideologies that underpin it, exposing the lies and the destructive consequences it leaves in its wake. (Breitbart London, 2015)”*

Sebelumnya pada bulan Juli 2015, pemerintah Inggris juga sudah mengeluarkan kebijakan yaitu skema baru masalah izin passpor di mana orang tua bisa mengajukan pencabutan paspor milik anak mereka yang diindikasikan akan pergi ke luar negeri dan bergabung dengan kelompok radikal (Dathan, 2015). Kebijakan ini dilakukan karena sejak kemunculan ISIS, sudah ada sekitar 700 warga Muslim Inggris yang bergabung dengan kelompok radikal tersebut (BBC, 2015).

Maka dari itu pemerintah Inggris memutuskan untuk ikut berperang melawan kelompok Islam radikal, ISIS (Castle & Erlanger, 2014), jumlah Muslim di Inggris saat

ini sudah meningkat secara signifikan, dan mereka juga tidak menutup kemungkinan untuk terpengaruh dari adanya paham radikal yang dibawa oleh ISIS, seperti apa yang dialami oleh remaja-remaja Inggris yang menyeberang ke Suriah melalui Turki untuk bergabung dengan kelompok tersebut.

Kesimpulan

Di era David Cameron, Inggris menerapkan beberapa kebijakan dalam rangka merespon pertumbuhan populasi Muslim di negara tersebut, seperti pembatasan jumlah imigran, dan memulangkan para imigran Muslim ke negara mereka masing-masing. Hal tersebut bertujuan untuk menjamin lapangan pekerjaan bagi warga asli Inggris, serta mencegah konflik social antara Muslim dan non Muslim di Inggris ditengah isu islamophobia.

Selain itu, pemerintah juga melakukan tindakan pencegahan untuk menangkal masuknya paham radikal ke Inggris guna melindungi Muslim Inggris dari paham radikal supaya tidak membahayakan keamanan dalam negeri Inggris. Jumlah Muslim yang sudah mencapai 2,8 juta, bukan tidak mungkin untuk menganut paham radikal, sehingga penting bagi David Cameron untuk Muslim Inggris tidak terpengaruh paham radikal.

Daftar Pustaka

Allen, C. (2010). *Islamophobia*. England: Ashgate Publishing Company.

Ansari, H. (2002). *Muslim in Britain*. United Kingdom: Minority Rights Group International.

- BBC. (2015). *Who are Britain's jihadists?* London: <http://www.bbc.com/>. Retrieved December 15, 2015, from <http://www.bbc.com/news/uk-32026985>
- BBC Indonesia. (2015). *Tiga remaja putri Inggris terbang ke Turki, dikhawatirkan gabung ke ISIS.* Jakarta: <http://www.bbc.com/indonesia>. Retrieved December 15, 2015, from http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2015/02/150221_tiga_siswa_london_gabung_isis
- BBC News. (2007). *Profile: Mohammad Sidiq Khan.* London: <http://news.bbc.co.uk/>. Retrieved December 15, 2015, from http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/4762209.stm
- Breitbart London. (2015). *Cameron Announces £5m Plan For 'Moderate Imams' And A Muslim Newspaper.* London: <http://www.breitbart.com/>. Retrieved December 15, 2015, from <http://www.breitbart.com/london/2015/10/18/cameron-announces-5m-plan-for-moderate-imams-and-a-muslim-newspaper/>
- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik [edisi revisi: cetakan kedua]*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Castle, S., & Erlanger, S. (2014). *3 Nations Offer Limited Support to Attack on ISIS.* New York: <http://www.nytimes.com/>. Retrieved December 15, 2015, from <http://www.nytimes.com/2014/09/27/world/europe/british-parliament-vote-isis-airstrikes.html>
- Commission on British Muslims and Islamophobia. (2004). *Islamophobia: issues, challenges, and action.* Staffordshire: Trentham Books Limited.
- Communities and Local Government. (2009). *The Pakistani Muslim Community in England Understanding Muslim Ethnic Communities.* London: Communities and Local Government.
- Durham Research Online. (2010). Thinking Ahead: David Cameron, the Henry Jackson Society and British Neo-conservatism. *British Journal of Politics and International Relations*, 347-363.
- European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia. (2005). *The Impact of 7 July 2005 London Bombing Attacks on Muslims Communities.* European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia.
- GOV.UK. (2015). *David Cameron discussed government plans to control immigration ahead of the Queen's Speech.* London: www.gov.uk. Retrieved December 15, 2015, from <https://www.gov.uk/government/speeches/pm-speech-on-immigration>
- Hizb ut-Tahrir. (2011). *The Future for Muslims in Britain.* Britain: Hizb ut-Tahrir.

- I don't get politics, me. (n.d.). *Right and Left Wing - What Does it Mean?*
<http://idontgetpolitics.co.uk/>. Retrieved December 15, 2015, from
<http://idontgetpolitics.co.uk/right-left-wing>
- National Statistics. (2013). *Immigration Statistics: October to December 2012*. London:
www.gov.uk. Retrieved December 19, 2015, from
<https://www.gov.uk/government/publications/immigration-statistics-october-to-december-2012/immigration-statistics-october-to-december-2012>
- Owen, G., & Lowther, W. (2015). *Smoking gun emails reveal Blair's 'deal in blood' with George Bush over Iraq war was forged a YEAR before the invasion had even started*. London: <http://www.dailymail.co.uk/>. Retrieved December 15, 2015, from
<http://www.dailymail.co.uk/news/article-3277402/Smoking-gun-emails-reveal-Blair-s-deal-blood-George-Bush-Iraq-war-forged-YEAR-invasion-started.html>
- Pooja Articles. (2013). *4 Major Premises of System Theory according to Easton's Model Analysis*. Political Science Notes. Retrieved December 15, 2015, from
<http://www.politicalsciencenotes.com/articles/4-major-premises-of-system-theory-according-to-eastons-model-analysis/496>
- Sian, K., Law, I., & Sayyid, S. (2012). *The Media and Muslims in the UK*. Leeds: Centre for Ethnicity and Racism Studies, University of Leeds.
- The Muslim Council of Britain. (2015). *British Muslims in Numbers; A Demographic, Socio-economic and Health profile of Muslims in Britain drawing on the 2011 Census*. London: The Muslim Council of Britain.
- Uberoi, V., & Modood, T. (2012). Inclusive Britishness: A Multiculturalist Advance. *Political Studies*, 1-19. Retrieved from
http://www.tariqmodood.com/uploads/1/2/3/9/12392325/inclusive_britishness.pdf
- Watt, N. (2015). *Tony Blair makes qualified apology for Iraq war ahead of Chilcot report*. London: <http://www.theguardian.com/>. Retrieved December 15, 2015, from
<http://www.theguardian.com/uk-news/2015/oct/25/tony-blair-sorry-iraq-war-mistakes-admits-conflict-role-in-rise-of-isis>
- Wintour, P. (2015). *Britain should not take more Middle East refugees, says David Cameron*. London: <http://www.theguardian.com/>. Retrieved December 15, 2015, from
<http://www.theguardian.com/world/2015/sep/02/david-cameron-migration-crisis-will-not-be-solved-by-uk-taking-in-more-refugees>